



## KEBIJAKAN PENDIDIKAN MULTIKULTURAL PADA PESERTA DIDIK NON-ISLAM DI SEKOLAH MUHAMMADIYAH KOTA KUPANG

Syahrul<sup>✉1</sup>, Arifin<sup>✉2</sup>

### Info Artikel

#### Sejarah Artikel:

Diterima Mei 2018  
Disetujui Juni 2018  
Dipublikasikan Juli  
2018

#### Keywords:

Multicultural  
Education, Non-  
Islamic Students,  
Kupang  
Muhammadiyah  
School.

#### How to Cite:

Syahrul, Arifin  
(2018). Kebijakan  
Pendidikan  
Multikultural pada  
Peserta Didik Non-  
Islam di Sekolah  
Muhammadiyah  
Kota Kupang. *Jurnal  
Pancasila dan  
Kewarganegaraan*,  
3(2), pp. 1-9. DOI:  
[http://dx.doi.org/10.  
24269/jpk.v3.n2.201  
8.pp1-9](http://dx.doi.org/10.24269/jpk.v3.n2.2018.pp1-9)

### Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kebijakan pendidikan multikultural pada peserta didik non-Islam di Sekolah Muhammadiyah Kupang. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Subyek penelitian ditentukan dengan teknik *purposive sampling* terdiri atas lingkungan sekolah, kurikulum, guru/kepala sekolah dan peserta didik SMA dan SMK Muhammadiyah Kupang. Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan catatan lapangan. Data penelitian ini dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif bergerak dalam lingkaran di antara pengumpulan data, pengorganisasian data, pembacaan/*memoing*, deskripsi, klasifikasi, penafsiran, dan penyajian/visualisasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan multikultural di SMA dan SMK Muhammadiyah Kupang dapat dilihat pada pengakuan hak peserta didik non-Islam, misalnya sekolah dengan ideologi Islam menerima peserta didik non-Islam, peserta didik perempuan non-Islam tidak diwajibkan menggunakan jilbab, sekolah memfasilitasi guru agama berdasarkan agama peserta didik dan meliburkan peserta didik pada setiap hari raya keagamaan. Selain itu, kebijakan pendidikan multikulturalisme di SMA dan SMK Muhammadiyah Kupang dapat dikategorikan ke dalam *hidden curriculum* karena tidak ditemukannya kata multikulturalisme di dalam kurikulum maupun visi dan misi, tetapi nilai-nilai multikulturalisme sangat dihargai oleh para guru dan kepala sekolah.

### Abstract

*The aims of this study were to analyze multicultural educational policy for non-Islamic students at Kupang Muhammadiyah School. The researce use qualitative method. Subject of research was determined of technic of purposive sampling such as school environement, curriculum, teacher/headmaster and students at SMA and SMK Muhammadiyah Kupang. Meanwhile, the data was collected through in-depth interview, observation, file note, and document. The research uses qualitative method in one circle to analyze data among collection, organization, reading/memo, description, classification, interpretation, and visualization. As a result, the study found multicultural educational policy at SMA and SMK Muhammadiyah Kupang can be showed on recognition of the rights of the students, namely: schools as ideology Islamic approve students from whole religions, non-Islamic female students are not required to wear the hijab, schools provide religion teacher for each religion, and dismissing students on every religious holiday. On the other hand, multicultural education policy at SMA and SMK Muhammadiyah Kupang can be categorized into hidden curriculum, because it was not found multicultural word in curriculum even vision and mission, but multicultural values are supported by the teacher and headmaster.*

© 2018 Universitas Muhammadiyah Ponorogo

✉ Alamat korespondensi:  
Universitas Muhammadiyah Kupang  
E-mail: syahrul842@yahoo.com<sup>1</sup>  
rifilatihan@yahoo.com<sup>2</sup>

ISSN 2527-7057 (Online)  
ISSN 2549-2683 (Print)

## PENDAHULUAN

Kebijakan pendidikan multikultural di Sekolah Muhammadiyah Kupang dapat dilihat dari segi toleransinya terhadap peserta didik non-Islam. Meskipun tidak secara gamblang diinformasikan melalui visi dan misi serta kurikulum, pendidikan multikultural telah diinternalisasikan melalui pendidikan yang berbasis kebudayaan. Ungkapan tersebut mengisyaratkan kemauan kuat untuk tetap menghargai perbedaan dan memahaminya sebagai realitas kehidupan menjadi potensi kesadaran pluralisme dan multikulturalisme di Kota Kupang (Tholkah, 2013).

SMA dan SMK Muhammadiyah Kupang adalah sekolah yang berideologi Islam tetapi memiliki banyak peserta didik non-Islam. Hal ini karena Kota Kupang memiliki penduduk non-Islam yang lebih dominan dibandingkan dengan orang-orang beragama Islam. Selain itu, sekolah ini juga memiliki banyak peserta didik dari latar belakang budaya, suku, bahasa, dan ras yang berbeda. Suku Jawa dan Bugis adalah suku yang berasal dari luar Provinsi NTT yang cukup banyak mendiami Kota Kupang. Namun, mereka tetap menjadi warga minoritas karena di Kota Kupang sendiri banyak didiami oleh suku-suku lokal yang berasal dari kabupaten Provinsi NTT sendiri. Bahasa orang Kupang memiliki ciri khas yang berbeda tetapi dalam penggunaan bahasa nasional, dialek dan struktur kata banyak dipengaruhi oleh bahasa lokal, sehingga orang-orang pendatang di Kota Kupang tidak secara keseluruhan memahami Bahasa Indonesia versi Kupang. Dengan adanya suku dari luar Provinsi NTT, ras orang Jawa, Bugis, dan Tioghoa menjadi minoritas di Kota Kupang. Hal ini dapat dilihat dari bentuk muka, warna kulit dan rambut (Gusti, 2014).

Dilema organisasi Islam di dalam masyarakat non-Islam mengancam akan eksistensi mereka. Hal ini yang dialami oleh Sekolah Muhammadiyah Kupang, karena orang-

orang Islam di Kota Kupang adalah kelompok minoritas yang berusaha untuk tetap eksis di tengah-tengah kelompok mayoritas. Di Kota Kupang terdapat organisasi besar Islam yaitu Muhammadiyah yang tentunya akan hanya dijangkau oleh orang-orang Islam saja. Agar tetap eksis, lembaga Muhammadiyah memiliki banyak amal usaha, salah satunya adalah pendidikan. Untuk mewujudkan masyarakat yang multikultural melalui lembaga pendidikan, organisasi ini memberi kesempatan kepada orang-orang non-Islam yang ingin menuntut ilmu di sekolah maupun perguruan tinggi milik Yayasan Muhammadiyah (Tholkah, 2013).

Banks (2008) mengungkapkan bahwa pendidikan multikultural mencakup seluruh peserta didik tanpa membedakan kelompok-kelompoknya seperti agama, gender, etnis, ras, dan budaya, serta strata sosial. Idealnya konsep pendidikan multikultural, tidak hanya semata-mata diarahkan pada wilayah ras, agama, dan kultur. Lebih jauh lagi, lembaga pendidikan Muhammadiyah cenderung pada pendidikan interkultural yang menekankan peningkatan pemahaman dan toleransi individu-individu yang berasal dari agama lain terintegrasi ke dalam masyarakat Islam. Pendidikan multikultural sebenarnya merupakan sikap peduli dan mau mengerti terhadap perbedaan atau politik pengakuan terhadap eksistensi orang-orang dari kelompok minoritas dalam segala hal untuk mencapai persatuan dalam perbedaan. Sehingga lembaga pendidikan Muhammadiyah tidak hanya memfokuskan pendidikan pada orang-orang Islam saja, tetapi juga melibatkan orang-orang non-Islam.

Menilik dari berbagai uraian di atas, penelitian kebijakan pendidikan multikultural di sekolah Muhammadiyah Kupang perlu dilakukan. Hal ini karena berdasarkan hasil pengalaman peneliti di berbagai kota di Indonesia khususnya Pulau Sulawesi dan Jawa, lembaga

pendidikan Muhammadiyah sebagai organisasi Islam cenderung mendidik orang-orang Islam saja. Sementara itu, lembaga pendidikan Muhammadiyah di Kota Kupang memiliki keunikan tersendiri karena menerima peserta didik yang beragama Kristen Protestan dan Katolik, bahkan orang-orang Islam menjadi peserta didik minoritas. Berdasarkan pada uraian tersebut di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah kebijakan pendidikan multikultural pada peserta didik non-Islam di Sekolah Muhammadiyah Kupang?

#### **METODE**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang didasarkan pada subyek penelitian yang menekankan interpretasi serta pemaknaan data secara naturalistik. Subyek penelitian dengan teknik *purposive sampling* terdiri atas peserta didik SMA dan SMK Muhammadiyah Kupang, guru dan kepala sekolah SMA dan SMK Muhammadiyah Kupang, beserta staf dan pegawai lainnya. Kriteria sampel peserta didik disesuaikan dengan kebutuhan, yakni peserta didik non-Islam; guru terkait kurikulum pembelajaran; staf dan pegawai terkait lingkungan sekolah; dan kepala sekolah terkait kebijakan pendidikan untuk peserta didik non-Islam. Setelah menjangkau sebanyak mungkin informasi dan telah mencapai titik jenuh, maka dipilih sebanyak 20 sampel untuk dianalisis, sebagaimana diungkapkan Creswell (2014) agar peneliti dapat mengembangkan suatu teori yang lengkap. Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, catatan lapangan, dan analisis dokumen. Keabsahan data dilakukan dengan mentriangulasi sumber, metode, dan teori. Data penelitian ini dianalisis menggunakan

teknik analisis kualitatif bergerak dalam lingkaran di antara pengumpulan data, pengorganisasian data, pembacaan/*memoing*, deskripsi, klasifikasi, penafsiran, dan penyajian/visualisasi.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### ***Kebijakan Pendidikan Multikultural untuk Peserta Didik Non-Islam di Sekolah Muhammadiyah Kupang***

Isu kebijakan pendidikan untuk peserta didik non-Islam di Sekolah Muhammadiyah Kupang sangat unik dalam beberapa temuan ini, karena di dalam internal Muhammadiyah sendiri terdapat banyak pendapat khususnya dari beberapa Tokoh Muhammadiyah yang berbeda penafsirannya tentang Islam, misalnya ada yang mendukung pendidikan multikultural sebagai dakwah kultural dan ada juga yang menentangnya karena menggagap itu tidak sejalan dengan ajaran agama Islam. Sehingga hal inilah yang kemudian memicu hadirnya wacana multikulturalisme dalam organisasi Muhammadiyah, misalnya ada kelompok Muhammadiyah nasional, kelompok Muhammadiyah puritan, kelompok Muhammadiyah kiri, kelompok Muhammadiyah liberal, kelompok Muhammadiyah moderat, dan kelompok Muhammadiyah abangan (Syamsuddin, 2017).

Beragamnya kelompok-kelompok Muhammadiyah di atas, menjadi semangat perjuangan para tokoh Muhammadiyah dalam menegakkan dakwah kultural sebagai wujud pendidikan multikultural yang di rumuskan dalam sidang tanwir di Denpasar Bali pada tahun 2002. Sehingga multikulturalisme hadir dalam mendukung gagasan tentang perbedaan dan keragaman di dalam internal Muhammadiyah yang kemudian memperkayanya dengan isu banyaknya peserta didik non-Islam di Sekolah Muhammadiyah Kupang (Budiman, 2007). Lebih jauh lagi, dakwah kultural Muhammadiyah mencakup subyek-subyek mengenai ketidakadilan,

kemiskinan, penindasan dan keterbelakangan kelompok-kelompok minoritas dalam berbagai bidang sosial, budaya, ekonomi, pendidikan dan lain-lain (Rahim, 2012).

### ***Peserta Didik Non-Islam di Sekolah Muhammadiyah Kupang***

Satu hal yang menjadi tanda tanya besar, mengapa di Sekolah Muhammadiyah Kupang hampir didominasi oleh peserta didik non-Islam? Jika kita membandingkan sekolah-sekolah Muhammadiyah pada umumnya di Indonesia, peserta didik yang beragama Islam pasti lebih dominan, bahkan kebanyakan sekolah-sekolah Muhammadiyah semua peserta didiknya beragama Islam. Sehingga dalam temuan ini, Sekolah Muhammadiyah Kupang cukup unik. Beberapa responden mengungkapkan bahwa

SMK dan SMA Muhammadiyah Kupang memiliki banyak peserta didik non-Islam karena di Kota Kupang sendiri umat Islam adalah agama yang minoritas dan sudah banyak alumni Sekolah Muhammadiyah Kupang non-Islam yang sukses dan bahkan jadi pendeta.

Keberadaan sekolah Muhammadiyah sebagai lembaga pendidikan yang diminati mahasiswa non-Islam karena citra Muhammadiyah yang multikulturalisme. Ini tidak hanya dilihat sebagai institusi agama Islam saja tetapi lebih pada penyelenggaraan pendidikan umum. Hasil observasi menunjukkan bahwa SMK dan SMA Muhammadiyah Kupang hampir didominasi oleh peserta didik non-Islam. Hal ini menjadi tolak ukur untuk kita, bahwa SMA dan SMK Muhammadiyah Kupang diminati bukan karena satu dua hal namun karena tingkat toleransi yang tinggi (Tholkhah, 2013).

### ***Pengakuan Atas Hak-hak Peserta Didik Non-Islam di Sekolah Muhammadiyah Kupang***

Sebagai sekolah Islam, SMA dan SMK Muhammadiyah Kupang tentunya

lebih mengutamakan esensi keislaman di dalam setiap kebijakan, namun sebagai sekolah yang multikulturalisme, juga tidak membatasi hak-hak peserta didik non-Islam. Sekolah ini memiliki peserta didik non-Islam yang minoritas namun eksistensi dan hak-hak mereka tetap diakui, karena sebagai sekolah yang menanamkan nilai-nilai multikulturalisme, hak-hak peserta didik non-Islam tetap terpenuhi, misalnya dari segi peribadahan, pembelajaran dan berpakaian. Dalam hasil wawancara, wujud pendidikan multikultural untuk peserta didik non-Islam di SMK dan SMA Muhammadiyah Kupang dapat kita lihat sebagai berikut:

- (1) Kesadaran multikulturalisme dalam segi beribadah, yaitu Sekolah Muhammadiyah Kupang meliburkan semua peserta didik setiap hari raya masing-masing agama, misalnya dalam perayaan hari paska oleh agama Kristen pada bulan April.
- (2) Kesadaran multikulturalisme dalam pembelajaran, yaitu Sekolah Muhammadiyah Kupang menyediakan guru agama untuk semua peserta didik berdasarkan agamanya masing-masing. Bahkan, guru yang mengajar mata pelajaran umum tidak hanya guru-guru yang beragama Islam, tetapi terdapat beberapa guru yang non-Islam.
- (3) Kesadaran multikulturalisme dalam segi berpakaian, yaitu peserta didik perempuan non-Islam tidak diwajibkan untuk menggunakan jilbab.

Berdasarkan pada uraian di atas, wujud multikulturalisme di SMK dan SMA Muhammadiyah Kupang menjadi syarat mutlak, yaitu sebagai peserta didik non-Islam yang memiliki hak minoritas, mereka tetap diperbolehkan untuk mengikuti pembelajaran kemuhammadiyaan yang nantinya akan menjadi identitas mereka sebagai alumni Sekolah Muhammadiyah. Pelajaran yang mereka peroleh adalah sekedar dasar-dasar untuk mengenal organisasi Muhammadiyah. Selain itu, mereka

kemudian lebih diperdalam dengan mendapatkan mata pelajaran berdasarkan agamanya masing-masing. Hal ini ditunjukkan dengan adanya pelajaran agama masing-masing bagi non-Islam. Pembelajaran dilakukan dengan disediakan ruangan khusus, seperti ruang kelas Agama Protestan dan Katolik. Pembelajaran agama non-Islam di SMA dan SMK Muhammadiyah Kupang dengan cara mendatangkan secara khusus Romo dan Pendeta secara rutin agar peserta didik non-Islam terfasilitasi tanpa membedakan agamanya.

#### ***Kebijakan Kurikulum Multikulturalisme di Sekolah Muhammadiyah Kupang***

Kurikulum multikultural di Sekolah Muhammadiyah Kupang tidak diwacanakan dalam bentuk teks, tetapi diterapkan melalui kebijakan-kebijakan pendidikan berupa regulasi dan struktural sekolah secara abstrak. Wacana kurikulum multikultural juga tidak lepas dari dakwah kultural Muhammadiyah yang berusaha untuk masuk pada semua kalangan masyarakat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang berdasarkan atas ajaran agama Islam.

#### ***Kebijakan Pendidikan Multikultural Melalui Hidden Curriculum***

Istilah *hidden curriculum* terdiri dari dua kata, yaitu *hidden* dan *curriculum*. Secara etimologi, kata "*hidden*" berasal dari bahasa Inggris yaitu *hide* yang berarti tersembunyi (terselubung) dan *hidden* (menyembunyikan). *Hidden curriculum* ini memang lebih menekankan pada kegiatan yang mengarahkan ke aspek sosial dan spiritual peserta didik sehingga nantinya peserta didik memiliki moral yang baik. Istilah *hidden curriculum* menunjuk kepada segala sesuatu yang dapat berpengaruh di dalam berlangsungnya pengajaran dan pendidikan. Dengan kata lain, *hidden curriculum* terdapat pada praktek dan hasil persekolahan yang tidak diuraikan dalam kurikulum

terprogram atau petunjuk kurikulum kebijakan sekolah (Subandijah, 1996).

Berdasarkan pengertian *hidden curriculum* di atas, pendidikan multikultural di SMA dan SMK Muhammadiyah Kupang menggunakan *hidden curriculum*. Hal ini karena, pendidikan multikultural disisipkan di semua mata pelajaran sebagai pesan moral, namun tidak dicantumkan secara tertulis dalam struktur kurikulum sekolah. Pendidikan multikultural tidak berdiri sendiri menjadi sebuah disiplin yang diajarkan karena cenderung menjadi sebuah kurikulum tersembunyi yang dipahami oleh semua guru, kepala sekolah, dan staf di SMA dan SMK Muhammadiyah Kupang.

Desain semacam ini telah lama diterapkan di Sekolah Muhammadiyah Kupang yang memfasilitasi peserta didik non-Islam dalam mendalami ilmu agamanya masing-masing artinya sikap toleransi yang diterapkan di sekolah ini sangatlah tinggi dengan harapan agar semua peserta didik baik yang Islam dan non-Islam menjaga kenyamanan dan kedamaian baik dilingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Desain semacam ini patutlah menjadi percontohan oleh lembaga lain agar tidak ada saling mencurigai antara satu golongan dengan yang lain yang menyebabkan perpecahbelahan masyarakat yang merugikan.

Dalam hasil wawancara, pendidikan multikultural dengan *hidden curriculum* yang coba dikembangkan di SMK dan SMA Muhammadiyah Kupang, misalnya,

pengenalan Bahasa Arab terhadap peserta didik non-Islam diberikan secara tidak wajib karena hanya untuk menambah pengetahuan dan wawasan. Dalam proses pembelajaran, Bahasa Arab dibagi menjadi dua kelas yaitu non-Islam dan Islam. Seperti, adanya kelas Kristen Protestan dan Katolik khusus serta kelas Islam. Materi yang diajarkan merupakan materi yang sederhana dan berkaitan dengan

keseharian, seperti pengucapan kata “Bapa” dengan menggunakan Bahasa Arab merupakan salah satu bentuk proses pembelajarannya.

Penggunaan Bahasa Arab diberikan untuk pemahaman bagi peserta didik non-Islam bahwa Bahasa Arab itu bukan hanya milik orang Islam saja dan pemikiran bahwa Arab itu Islam, sehingga tidak ada *phobia* terhadap penggunaan Bahasa Arab bagi peserta didik non-Islam dan cara ini kembali bertujuan meluruskan pandangan peserta didik non-Islam terhadap Islam sendiri yang mempunyai nilai-nilai perdamaian.

Selain Bahasa Arab, peserta didik juga diajarkan Al-Islam Kemuhammadiyaan, karena peserta didik yang mempelajari lebih dari satu agama memiliki sikap toleransi lebih tinggi dibandingkan dengan peserta didik yang hanya mempelajari satu agama saja. Jeny Elna (dalam Efendi & Suswanta, 2017) juga menemukan bahwa terdapat korelasi antara pendidikan agama berwawasan pluralis atau multikultural dengan peningkatan sikap, perilaku, dan wawasan pluralitas peserta didik. *Outcome* demikian ini menjadi sangat penting untuk menjadi perekat kehidupan berbangsa sekaligus sebagai langkah antisipatif dari gejala konflik horizontal atau sengketa iman.

#### ***Kebijakan Kurikulum Multikultural Pada Satuan Individu***

Adanya peserta didik non-Islam di SMA dan SMK Muhammadiyah Kupang mengharuskan setiap pengambilan kebijakan kurikulum multikultural yang tepat. Maka di Sekolah Muhammadiyah Kupang menggunakan kebijakan kurikulum multikultural pada satuan individu. Hal ini dilakukan karena Sekolah Muhammadiyah adalah sekolah Islam, namun umat Islam di Kota Kupang adalah minoritas karena mereka adalah pendatang. Ini juga dilakukan untuk mengakui hak peserta didik dalam status kolektif sebagai kelompok-kelompok agama. Kebijakan kurikulum

multikultural pada satuan individu adalah menggeser penekanan yang semata-mata meletakkan hak orang Islam di Sekolah Muhammadiyah menjadi bagian dari kolektivitas (hak semua agama), sehingga identitas, asal usul dan agama non-Islam tidak diabaikan. Umumnya kebijakan ini digunakan oleh lembaga yang menghadapi masalah, misalnya Muhammadiyah di NTT karena populasi penduduk Islam lebih sedikit daripada penduduk non-Islam (Budiman, 2007).

Kebijakan kurikulum multikultural pada satuan individu sangat tepat untuk SMA dan SMK Muhammadiyah Kupang karena Muhammadiyah memiliki ideologi sosial yang terbuka. Ideologi pluralisme dalam Muhammadiyah berakar pada prinsip relativisme pemahaman agama dan *ijtihad*. Dalam prinsip relativisme tersebut, Muhammadiyah terbuka terhadap paham dan ide-ide baru dari manapun datangnya. Keterbukaan Muhammadiyah terhadap pluralisme keagamaan nampak jelas dalam pembaharuan pendidikan Muhammadiyah yang meliputi, adopsi sistem sekolah model belanda, pengajaran studi sekuler dan diterimanya siswa non-Islam dan abangan dalam sekolah Muhammadiyah (Efendi & Suswanta, 2017).

Saat ini amal usaha yang dimiliki Muhammadiyah juga berusaha keras untuk mengembangkan kultur keterbukaan. Semangat keterbukaan Muhammadiyah tentu akan sangat berarti bagi warganya, terutama mereka yang berada di daerah minoritas. Sekolah Muhammadiyah di daerah mayoritas Kristen, seperti di Nusa Tenggara Timur, khususnya Kota Kupang, juga memiliki banyak peserta didik beragama Kristen. Fenomena ini menunjukkan jati diri Muhammadiyah yang meski bercirikan Islam tetapi memiliki kepedulian yang sangat besar yang diwujudkan melalui sikap menghargai keragaman budaya dan kepercayaan masyarakat (Biyanto, 2013).

***Pendidikan Multikultural Sebagai Dakwah Kultural di Sekolah Muhammadiyah Kupang***

Dakwah kultural adalah bagian dari strategi kebudayaan dan manajemen pengelolaan sosial Muhammadiyah. Dalam konsep dakwah kultural tersebut, umat Islam digiring untuk memerhatikan atau minimal menyediakan arus realitas yang berkembang, baik masa lalu maupun saat ini. Termasuk juga menyediakan konteks faktual seperti menyediakan pendidikan multikultural di lembaga pendidikan Muhammadiyah. Ini diperkuat dari hasil keputusan Tanwir yang memberikan pijakan legitimasi terhadap pengurus Muhammadiyah untuk memformat program yang berwawasan keragaman budaya (Syamsuddin, 2017).

Sidang Tanwir di Denpasar Bali pada tahun 2002 melahirkan pendidikan multikultural di beberapa lembaga Muhammadiyah salah satunya SMA dan SMK Muhammadiyah Kupang. Hal ini didasarkan pada hasil bahasan panjang yang melibatkan sejumlah pengurus pusat, akademisi, dan perwakilan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah. Dalam sidang tersebut, akhirnya tercetus sebuah ide besar tentang apa yang disebut “dakwah kultural”. Sehingga, salah satu program yang harus dijalankan pengurus harian Muhammadiyah di semua level pimpinan terkait dengan proyek “dakwah kultural” adalah mengembangkan sarana maupun prasarana pendidikan, utamanya yang berwawasan masa depan. Era globalisasi yang meniscayakan sejarah kemanusiaan, mau tidak mau harus diantisipasi oleh Muhammadiyah, dan untuk itu kemampuan dalam penguasaan iptek tidak bisa diremehkan. Jika umat Islam tidak cerdas dalam penyikapannya, maka yang terjadi hanyalah perilaku-perilaku anti-sosial, akstrim, hingga offensif terhadap yang lain (Syamsuddin, 2017).

Banyak penelitian soal Muhammadiyah sebelumnya seperti yang dilakukan oleh Nakamura, James L. Peacock, Ahmad Jainuri, dan Alwi

Shihab yang menunjukkan bahwa meskipun Muhammadiyah sangat menekankan pengamalan Islam Tauhid atau Islam murni, para pendiri dan tokoh Muhammadiyah pada umumnya telah menanamkan nilai-nilai multikulturalisme dengan cara bersikap terbuka dan toleran terhadap tradisi masyarakat dan pemeluk agama lain, khususnya Kristen (Efendi & Suswanta, 2017). Meskipun multikulturalisme sudah lama diterapkan di dalam organisasi Muhammadiyah masih terdapat kelompok-kelompok di dalam Muhammadiyah yang anti multikulturalisme karena menganggap bahwa multikulturalisme adalah paham yang keliru. Misalnya, dalam keputusan sidang tanwir Muhammadiyah yang telah menuangkan wacana dakwah kultural dianggapnya keputusan yang salah kaprah, karena bagi mereka, keberagaman memang diakui eksistensi dalam al-Qur’an, tetapi pengakuan tersebut tidak sama dengan membenarkan. Lebih jauh lagi. Mereka menganggap bahwa dalam beberapa ayat al-Qur’an bahkan secara tegas Allah mengutuk umat atau kelompok masyarakat karena mereka ingkar dan tidak mau bertauhid secara murni (Syamsuddin, 2017).

Meskipun adanya penolakan terhadap dakwah kultural di dalam Muhammadiyah, tidak mematahkan semangat Sekolah Muhammadiyah Kupang untuk mengubah pola pikir masyarakat melalui strategi pendidikan multikultural dengan cara memperkenalkan Islam kepada peserta didik non-Islam agar stigma negatif tentang Islam bisa diluruskan. Misalnya, stigma yang melekat tentang Islam sebagai teroris (*islamophobia*), aliran-aliran radikal dalam Islam dan sebagainya. Strategi tersebut melalui mata pelajaran Kemuhammadiyahan yang mempelajari Islam secara khusus, mempelajari sejarah Islam, dan kemuhammadiyaan. Ini diajarkan dengan harapan agar semua peserta didik mengenal Islam dengan baik sehingga

setelah mendapatkan pemahaman timbul sikap toleransi antara umat baik non-Islam dan Islam. Dengan adanya mata pelajaran ini, peserta didik non-Islam dapat mengetahui secara umum mengenai Islam dan Muhammadiyah serta menambah pengetahuan mereka (Efendi & Suswanta, 2017).

Hasil wawancara dengan guru di SMA dan SMK Muhammadiyah Kupang mengatakan bahwa pembelajaran kemuhadiyah dibagi menjadi dua kategori, yaitu

- (1) kemuhadiyah dasar untuk non-Islam sehingga ketika mereka telah selesai menempuh pendidikan di Sekolah Muhammadiyah mereka mampu menyampaikan Muhammadiyah secara benar, dan
- (2) kemuhadiyah mendalam untuk Islam yang berisikan materi materi aqidah, sehingga pemberian materi ini mampu menekan konflik horizontal di NTT khususnya di Kota Kupang sendiri.

Seperti yang kita ketahui banyak konflik yang terjadi akibat kurangnya informasi atau miss informasi tentang Islam dan organisasi Islam, salah satunya Muhammadiyah yang menimbulkan kecurigaan-kecurigaan yang berdampak terjadinya intoleransi baik sesama Islam ataupun antar pemeluk agama. Menurut beberapa narasumber, praktik pelaksanaan AIK di SMA dan SMK ini secara langsung mampu menekan efek resistensi pasca kerusuhan tahun 1998. Pada waktu itu situasi di NTT kupang khususnya antara kelompok saling mencederai sehingga dengan diberikan mata pelajaran ini turut membantu mencairkan suasana.

#### **SIMPULAN**

Pendidikan multikultural di Sekolah Muhammadiyah Kupang didukung oleh wacana 'dakwah kultural' Muhammadiyah. Sehingga peserta didik non-Islam di Sekolah Muhammadiyah dapat memperoleh haknya, misalnya kesempatan beribadah dan model berpakaian. Sekolah ini memfasilitasi

guru agama untuk masing-masing peserta didik berdasarkan agamanya. Untuk perempuan non-Islam, baik itu guru maupun peserta didik tidak diwajibkan untuk menggunakan jilbab. Dukungan juga untuk hari peribadahan setiap agama, sehingga setiap hari raya agama, Sekolah Muhammadiyah Kupang meliburkan semua peserta didik.

Kebijakan kurikulum multikultural di Sekolah Muhammadiyah Kupang melalui *hidden curriculum*. Misalnya, pembelajaran Bahasa Arab tidak diwajibkan bagi peserta didik non-Islam dengan alasan bahwa Bahasa Arab itu bukan hanya milik orang Islam saja, sehingga tidak ada *phobia* terhadap penggunaan Bahasa Arab bagi peserta didik non-Islam. Peserta didik juga diajarkan Al-Islam Kemuhadiyah, karena mempelajari lebih dari satu agama memiliki sikap toleransi lebih tinggi dibandingkan dengan hanya mempelajari satu agama saja.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Banks, James A. (2008). *An Introduction to Multicultural Education*. United States: Library of Congress Cataloging.
- Biyanto. (2013). Pengalaman Muhammadiyah Membumikan Nilai-Nilai Pluralisme. *Islamica*, Vol. 7, No. 2, Maret 2013, 318-339.
- Budiman, Hikmat. (2007). *Hak Minoritas: Dilema Multikulturalisme di Indonesia*. Jakarta: The Interseksi Foundation.
- Creswell, John W. (2014). *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset: Memilih di Antara Lima Pendekatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Efendi, David & Suswanta. (2017). *Politics of Education: Multiculturalism Practice in Universitas Muhammadiyah Kupang, NTT*. *Iseedu*, Vol. 1, No. 1, November 2017, 47-72.

- Gusti, Otto. (2014).  
<http://kupang.tribunnews.com/2014/07/21/multikulturalisme>, diakses 4 Desember 2017, tersedia dalam [www.google.com](http://www.google.com)
- Rahim, Rahmawaty. (2012). Signifikansi Pendidikan Multikultural Terhadap Kelompok Minoritas. *Analisis*, Vol. XII, No. 1, Juni 2012, 161-182.
- Subandijah. (1996). *Pengemangan dan Inovasi Kurikulum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Syamsuddin, Muh. (2017). Gerakan Muhammadiyah dalam Membumikan Wacana Multikulturalisme: Sebuah Landasan Normatif Institusional. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran dan Dakwah Pembangunan*, Vol. 1, No. 2, Agustus 2017, 361-392.
- Tholkhah, Imam. (2013). Pendidikan Toleransi Keagamaan: Studi Kasus SMA Muhammadiyah Kupang Nusa Tenggara Timur. *Edukasi*, Vol. 11, No. 2, Mei-Agustus 2013, 165-181.